

REDEFINISI DIPLOMASI PERDAMAIAN: PARTISIPASI STRATEGIS INDONESIA DALAM BOARD OF PEACE DAN UPAYA STABILISASI GAZA

Aditya Romadhon^{1)*}

Ilmu Politik, Universitas Jambi¹⁾

adityaromadhon@unja.ac.id

Article Info

Article History:

Received:

March/2026

Accepted:

May/2026

Published:

June/2026

Keywords:

Indonesia Foreign Policy; Board of Peace; Gaza; Middle Power; Islamic Identity.

Kata kunci:

Kebijakan Luar Negeri Indonesia; Dewan Perdamaian; Gaza; Kekuatan Menengah; Identitas Islam.

ABSTRACT

The contemporary architecture of global peace diplomacy is undergoing a profound transformation driven by the fragmentation of the post-Cold War order and the rise of middle powers. This research examines Indonesia's strategic shift under President Prabowo Subianto, marked by the unprecedented 2026 decision to join the US-led Board of Peace (BoP) and offer 20,000 troops for Gaza stabilization. Using a tripartite framework of Neoclassical Realism, Social Constructivism, and Middle Power Role Theory, the study interrogates how Jakarta reconciles this pragmatic pivot with its "bebas-aktif" doctrine. Findings indicate that while the troop offer serves as symbolic hard-power diplomacy, participation in the BoP is a realist calculation linked to economic incentives like tariff reductions and OECD accession. The state successfully mitigates domestic backlash by co-opting Islamic institutions to re-narrate alignment as a moral necessity.

ABSTRAK

Arsitektur kontemporer diplomasi perdamaian global sedang mengalami transformasi mendalam yang didorong oleh fragmentasi tatanan pasca-Perang Dingin dan kebangkitan kekuatan menengah (*middle powers*). Penelitian ini mengkaji pergeseran strategis Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang ditandai dengan keputusan monumental pada tahun 2026 untuk bergabung dengan *Board of Peace* (BoP) pimpinan AS dan menawarkan 20.000 pasukan untuk stabilisasi Gaza. Menggunakan kerangka tripartit Realisme Neoklasik, Konstruktivisme Sosial, dan Teori Peran Kekuatan Menengah, studi ini menginterogasi bagaimana Jakarta merekonsiliasi poros pragmatis ini dengan doktrin "bebas-aktif". Temuan menunjukkan bahwa meskipun tawaran pasukan

berfungsi sebagai diplomasi *hard-power* simbolis, partisipasi dalam BoP adalah kalkulasi realis yang terkait dengan insentif ekonomi seperti pengurangan tarif dan akses OECD. Negara berhasil memitigasi resistensi domestik dengan mengooptasi lembaga-lembaga keislaman untuk menarasikan ulang manuver tersebut sebagai sebuah keniscayaan moral.

PENDAHULUAN

Arsitektur kontemporer diplomasi perdamaian global saat ini sedang mengalami transformasi mendalam yang didorong oleh fragmentasi tatanan internasional pasca-Perang Dingin, persepsi usangnya lembaga multilateral tradisional, dan meningkatnya pengaruh *middle powers*. Di episentrum realignmen geopolitik ini stands Republik Indonesia yang menduduki posisi strategis unik sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan rumah bagi demografi Muslim terbesar di dunia. Selama lebih dari tujuh dekade, landasan dasar hubungan luar negeri Indonesia adalah doktrin "bebas-aktif", sebuah mandat konstitusional yang mengarahkan Jakarta untuk menjaga jarak strategis dari hegemon global sembari secara aktif mengejar dekolonisasi, keadilan global, dan hak asasi manusia. Pilar yang paling abadi dari tradisi ini adalah solidaritas ideologis Indonesia yang tidak kenal kompromi dengan perjuangan Palestina, yang merupakan konsensus di seluruh spektrum politik nasional.

Namun, komunitas internasional menyaksikan pergeseran paradigma yang dramatis dalam postur diplomatik Jakarta yang menantang ortodoksi diplomasi selama puluhan tahun. Selama Majelis Umum PBB pada 23 September 2025, Presiden Prabowo Subianto secara fundamental mengalibrasi ulang pendekatan Indonesia terhadap Timur Tengah dengan menawarkan hingga 20.000 tentara untuk Gaza dan memberikan pengakuan bersyarat terhadap keamanan Israel yang ditutup dengan salam "Shalom". Langkah ini disusul dengan manuver geopolitik monumental pada Januari 2026 di Davos, di mana Indonesia secara resmi bergabung dengan *Board of Peace* (BoP)—sebuah institusi multilateral pimpinan AS yang beroperasi di luar kerangka PBB dan mengeksklusi perwakilan Palestina dari peran pengambilan keputusan. Pivot strategis ini memicu perdebatan sengit mengenai integritas narasi Indonesia sebagai pendukung setia Global South.

State of the art atau kajian literatur sebelumnya menunjukkan evolusi diplomasi Indonesia dari era Sukarno yang anti-imperialis keras, era Suharto yang mulai melakukan kerja sama intelijen diam-diam dengan Israel, hingga era SBY yang memanfaatkan identitas demokrasi Islam moderat. Literatur terkini dari Sukma (2024) menekankan bahwa identitas Islam seringkali menjadi batasan bagi Indonesia untuk bertindak sebagai mediator aktif yang memerlukan kompromi sulit. Sementara itu, Widjajanto (2026) mencatat bahwa doktrin "bebas-aktif" saat ini sedang mengalami reinterpretasi paling radikal menuju "realisme pragmatis" dan "multi-alignment" di bawah administrasi Prabowo. Penelitian oleh Snider (2025) juga menyoroti transisi Indonesia menjadi aktor global yang mampu menavigasi kompetisi kekuatan besar.

Gap analysis dari penelitian ini terletak pada perlunya menjawab bagaimana negara merekonsiliasi partisipasi dalam institusi hegemonik seperti BoP dengan

doktrin "bebas-aktif" serta mekanisme kooptasi identitas Islam domestik untuk melegitimasi pergeseran berisiko tinggi tersebut. Pentingnya riset ini didorong oleh kenyataan bahwa integrasi ke dalam BoP terkait langsung dengan kepentingan ekonomi vital, termasuk pengurangan tarif AS dari 32% ke 19% melalui perjanjian "*New Golden Age*" dan percepatan akses OECD. Keunikan riset ini adalah sintesis komprehensif terhadap empat ranah tematik—evolusi doktrin, diplomasi kekuatan menengah, identitas Islam, dan dinamika konflik Gaza—untuk mengisi celah literatur yang ada.

Untuk menjawab celah riset tersebut, penelitian ini dikembangkan berdasarkan sintesis komprehensif dari tiga pendekatan teoretis (kerangka tripartit). *Pertama*, Realisme Neoklasik, yang digunakan untuk menganalisis bagaimana tekanan sistemik (seperti dominasi kekuatan ekonomi AS dan insentif material) diterjemahkan oleh elit negara menjadi kebijakan luar negeri yang pragmatis. *Kedua*, Konstruktivisme Sosial, yang memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana identitas Islam domestik dan batasan normatif pro-Palestina dikonstruksi, direproduksi, atau bahkan didekonstruksi oleh aktor negara demi mitigasi risiko politik. *Ketiga*, Teori Peran Kekuatan Menengah (*Middle Power Role Theory*), yang mengontekstualisasikan tawaran pengerahan militer besar-besaran sebagai instrumen *performative statecraft* untuk memproyeksikan status di tingkat global.

Berpijak pada landasan teoretis tersebut, penelitian ini memformulasikan tiga pertanyaan analitis utama. *Pertama*, apakah partisipasi Indonesia dalam BoP murni didorong oleh kalkulasi ekonomi-politik pragmatis alih-alih pergeseran ideologis. *Kedua*, sejauh mana tawaran pengerahan pasukan ke Gaza berfungsi sebagai diplomasi *hard-power* simbolis untuk mempertahankan peran identitas di panggung internasional. *Ketiga*, bagaimana negara mengelola potensi resistensi domestik akibat pergeseran kebijakan ini melalui strategi kooptasi narasi bersama organisasi Islam. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemeriksaan mendalam mengenai dimensi teoretis dan praktis pergeseran kebijakan luar negeri Indonesia. Ruang lingkup permasalahan dibatasi pada keterlibatan Indonesia dalam BoP dan tawaran militer di Gaza. Melalui analisis ini, naskah ini berargumen bahwa partisipasi dalam BoP merupakan latihan realisme pragmatis yang dikelola melalui strategi kooptasi lembaga Islam domestik untuk memitigasi *backlash* politik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemeriksaan mendalam mengenai dimensi teoretis dan praktis dari pergeseran kebijakan luar negeri Indonesia dalam menavigasi gesekan antara solidaritas ideologis dan kalkulasi pragmatis. Ruang lingkup permasalahan dibatasi pada keterlibatan Indonesia dalam BoP dan tawaran militer 20.000 tentara di Gaza sebagai bentuk "diplomasi kekuatan keras simbolis". Melalui analisis ini, diharapkan diperoleh pemahaman mengenai apakah pensinyalan *hard-power* ini mewakili elevasi substantif status kekuatan menengah Indonesia atau sekadar latihan citra untuk prestise internasional. Naskah ini berargumen bahwa partisipasi dalam BoP merupakan latihan realisme ofensif yang dikelola melalui strategi co-optasi organisasi Islam domestik untuk memitigasi *backlash* politik.

METODE PENELITIAN

Untuk memastikan fondasi yang sangat kuat, transparan, dan berbasis bukti, naskah ini menggunakan metodologi Tinjauan Sistematis Kualitatif yang dikombinasikan dengan Sintesis Meta-Analitis tematik. Pendekatan ini secara metikulus mematuhi pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang dikustomisasi untuk disiplin ilmu politik dan hubungan internasional. Strategi pencarian mencakup beragam sumber berkualitas tinggi, termasuk dokumen kebijakan utama negara, catatan pemungutan suara resmi Majelis Umum PBB (UNGA), artikel *peer-reviewed* pada database Scopus (kuartil Q1 dan Q2), rilis pers resmi Kementerian Luar Negeri RI, serta laporan komprehensif dari *think-tank* global seperti LAB 45, RSIS, dan The Lowy Institute. Ruang lingkup kajian dibatasi pada dekade terakhir (2016–2026), dengan fokus utama pada periode 2023–2026 untuk menangkap dinamika konflik Gaza dan pembentukan *Board of Peace*. Berdasarkan alur kerja PRISMA, diidentifikasi kumpulan awal sebanyak 1.233 catatan, yang kemudian melalui proses penghapusan duplikat dan skrining manual ketat menghasilkan 184 artikel teks lengkap untuk dinilai kelayakannya. Sintesis kualitatif akhir menggabungkan 40 sumber elit yang secara langsung menginformasikan tujuan teoretis dan empiris penelitian ini. Data yang diekstraksi kemudian dikoding terhadap tiga dimensi teoretis: Realisme Neoklasik untuk dorongan material, Konstruktivisme Sosial untuk faktor identitas, dan Teori Peran Middle Power untuk perilaku performatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sintesis meta-analitis dari literatur elit yang dipilih mengungkapkan sebuah aparat kebijakan luar negeri yang sangat kompleks dan berlapis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jauh dari diplomasi yang hanya didorong oleh ideologi sederhana di masa lalu, tata negara Indonesia kontemporer saat ini dicirikan oleh praktik transaksionalisme berisiko tinggi. Temuan ini kemudian dikategorikan ke dalam lima pilar tematik inti yang mengekspos gesekan mendalam antara warisan normatif Indonesia dengan strategi pragmatisme yang baru muncul.

Logika Geopolitik dan Kalkulasi Realis: Reorientasi Strategis Melalui *Board of Peace* (BoP)

Keputusan Jakarta untuk secara resmi bergabung dengan *Board of Peace* (BoP) dalam forum Davos mewakili salah satu titik balik paling signifikan dan berani dalam sejarah diplomatik kontemporer Indonesia. BoP, yang dikonsepsikan oleh administrasi Trump sebagai alternatif hegemonik langsung terhadap Dewan Keamanan PBB yang sedang lumpuh, secara fundamental mereorientasi pendekatan global terhadap manajemen konflik di Timur Tengah. Melalui kacamata realisme neoklasik, langkah ini bukan sekadar upaya mediasi, melainkan pengakuan eksplisit bahwa arsitektur keamanan lama yang berbasis pada konsensus multilateral tidak lagi mampu memberikan hasil materiil bagi kepentingan nasional. Prabowo memandang dunia sebagai arena anarkis di mana "yang kuat mendominasi yang lemah," sehingga partisipasi dalam BoP adalah upaya untuk memastikan Indonesia berada di pihak yang kuat dalam pembentukan tatanan baru. BoP sendiri memiliki struktur yang sangat transaksional, di mana keanggotaan permanen dapat "dibeli" dengan komitmen finansial sebesar \$1 miliar, sebuah mekanisme yang secara radikal mengubah diplomasi dari pertukaran nilai menjadi pertukaran modal.

Struktur operasional BoP yang lebih menyukai arsitektur pasifikasi ekonomi dan stabilisasi lokal dibandingkan solusi dua negara secara politik menciptakan paradoks mendalam bagi Indonesia. Piagam pendirian BoP sangat menekankan pada visi "Gaza Baru" yang dibangun di atas fondasi investasi infrastruktur masif, pembentukan zona ekonomi khusus, koridor perumahan, dan hub pariwisata, yang didukung oleh mandat rekonstruksi pasca-konflik senilai \$50 miliar. Kritikan tajam muncul karena model ini secara eksplisit mengeksklusi Otoritas Palestina dari peran pengambilan keputusan inti, sementara menempatkan Israel sebagai mitra keamanan dan ekonomi penuh. Indonesia, yang secara historis menjadi pendukung utama kedaulatan Palestina, kini menghadapi risiko berat karena dianggap mendukung "bentuk perdamaian ilusif" yang mereduksi posisi para korban dari subjek berdaulat menjadi sekadar objek amal internasional. Namun, Jakarta berargumen bahwa dengan berada di dalam BoP, Indonesia dapat bertindak sebagai penyeimbang moral dari dalam sistem, mencegah Gaza berubah menjadi sekadar proyek real estate global.

Logika pragmatis yang mendorong masuknya Indonesia ke BoP terkait erat dengan agenda akses ke *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, telah menegaskan bahwa Indonesia harus menormalisasi hubungan dengan seluruh anggota, termasuk Israel, sebagai syarat mutlak keanggotaan. Dalam konteks ini, partisipasi di BoP berfungsi sebagai "jembatan normalisasi" yang memungkinkan Jakarta untuk berinteraksi secara formal dengan Yerusalem tanpa harus segera membuka hubungan diplomatik penuh yang sensitif secara domestik. Perhitungan realis Prabowo menyimpulkan bahwa manfaat ekonomi jangka panjang dari bergabung dengan "klub negara kaya" OECD jauh melampaui biaya politik jangka pendek dari pelunakan sikap terhadap Israel. Ini adalah manifestasi dari "good neighbor policy" yang diperluas ke tingkat global, di mana stabilitas ekonomi diutamakan sebagai fondasi bagi kedaulatan nasional.

Secara makro, integrasi Indonesia ke dalam BoP adalah bagian dari manuver geopolitik yang lebih luas untuk menyelaraskan diri dengan aliansi "New Golden Age" bersama Amerika Serikat. Perjanjian ini berhasil mengamankan pengurangan tarif ekspor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen, sebuah konsesi ekonomi yang sangat krusial bagi stabilitas manufaktur domestik. Penyelarasan temporal antara keanggotaan BoP dan kesepakatan dagang ini menunjukkan bahwa Jakarta sedang mempraktikkan "realisme ofensif," di mana dukungan politik diberikan kepada inisiatif strategis AS sebagai imbalan atas akses pasar dan perlindungan ekonomi. Tabel di bawah ini merinci perbandingan antara jalur diplomasi tradisional dan jalur transaksional BoP yang kini ditempuh oleh Indonesia.

Tabel 1: Matriks Perbandingan Arsitektur Diplomasi Indonesia

Dimensi	Diplomasi Tradisional (PBB/ASEAN)	Diplomasi Baru (BoP/Davos)
Landasan Filosofis	Idealisme Normatif & Anti-Kolonialisme	Realisme Transaksional & Pragmatisme
Aktor Penentu	Konsensus Negara Anggota	Dewan Eksekutif Berbasis Modal (Kushner, Blair, dsb.)

Dimensi	Diplomasi Tradisional (PBB/ASEAN)	Diplomasi Baru (BoP/Davos)
Fokus Solusi	Kedaulatan Politik & Penentuan Nasib Sendiri	Pasifikasi Ekonomi & Rekonstruksi Infrastruktur
Status Israel	Isolasi Diplomatik (Hingga Merdeka)	Pengakuan Keamanan Bersyarat
Biaya Partisipasi	Kontribusi Anggota Proporsional	\$1 Miliar untuk Keanggotaan Permanen

Analisis kritis terhadap posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang melakukan pertaruhan geopolitik yang paling berbahaya dalam sejarahnya. Jika BoP gagal menghasilkan perdamaian yang adil bagi Palestina dan hanya memperkuat pendudukan Israel, maka kredibilitas Indonesia di Global South dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan mengalami erosi yang tidak dapat diperbaiki. Namun, bagi administrasi Prabowo, risiko isolasi ekonomi dari pasar Barat dan kegagalan dalam kompetisi regional dengan Vietnam dan Malaysia dianggap jauh lebih eksistensial bagi masa depan Indonesia. Dengan demikian, BoP bukanlah sekadar forum perdamaian, melainkan instrumen ekonomi-politik yang digunakan Jakarta untuk menavigasi ketidakpastian tatanan dunia pasca-unipolar.

Operasionalisasi Stabilisasi Gaza dan Paradoks Pensinyalan Hard-Power

Salah satu pilar pendefinisi dari diplomasi asertif Presiden Prabowo adalah penawaran publik yang sangat gencar untuk mengerahkan personel militer aktif ke Jalur Gaza. Tawaran ini berkembang dari 8.000 menjadi 20.000 personel selama pidato di Majelis Umum PBB, yang menandai komitmen luar biasa terhadap International Stabilization Force (ISF). Secara historis, Indonesia memang memiliki silsilah penjaga perdamaian yang sangat dihormati melalui Kontingen Garuda, namun rencana pengerahan di bawah ISF yang dipimpin BoP menghadirkan hambatan operasional yang sangat berbeda dengan misi PBB tradisional. ISF beroperasi dalam "wilayah abu-abu" hukum internasional, di luar mekanisme bab VII Piagam PBB, yang berarti aturan pelibatan (rules of engagement) tidak ditentukan secara multilateral melainkan melalui koordinasi langsung dengan pasukan pendudukan di lapangan. Hal ini menempatkan TNI dalam posisi yang sangat rentan secara hukum dan operasional, di mana mereka dapat dipandang sebagai pasukan penstabil rezim baru daripada penjaga perdamaian yang imparisial.

Analisis militer mengonfirmasi bahwa penyisipan pasukan ke Gaza—zona perang asimetris seluas 365 kilometer persegi yang dicirikan oleh jaringan terowongan sepanjang 500 kilometer—akan membutuhkan interoperabilitas tingkat NATO yang belum pernah dipraktikkan oleh TNI. Koordinasi logistik dan keamanan harus dilakukan secara langsung dengan *Israeli Defense Forces* (IDF) untuk menghindari insiden "*friendly fire*" di wilayah yang sangat padat penduduk. Mengingat secara konstitusional Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel, prospek komandan TNI melakukan koordinasi intelijen waktu nyata dengan IDF adalah hal yang beracun secara politik di dalam negeri. Akibatnya, tawaran pasukan ini berfungsi murni sebagai "diplomasi kekuatan keras simbolis" yang dirancang untuk memproyeksikan citra kepemimpinan yang berani tanpa

ekspektasi materiil untuk direalisasikan sepenuhnya di tengah konflik yang masih berkecamuk.

Hambatan hukum domestik juga membayangi rencana pengerahan ini. Meskipun revisi UU TNI No. 34 Tahun 2004 pada Maret 2025 telah memperluas mandat militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pengerahan pasukan ke wilayah yang tidak memiliki kejelasan mandat PBB tetap menjadi perdebatan konstitusional. Pasal 7 UU TNI yang baru memungkinkan militer melakukan tugas untuk "melindungi kepentingan nasional di luar negeri," namun definisi kepentingan nasional ini sangat ambigu dan dapat disalahgunakan untuk melegitimasi petualangan militer yang berisiko tinggi demi tujuan diplomatik transaksional. Kritikus dari masyarakat sipil mengkhawatirkan bahwa obsesi terhadap proyeksi hard-power ini justru akan mengorbankan profesionalisme militer dan menyeret TNI ke dalam pusaran konflik Timur Tengah yang tidak memiliki jalan keluar politik yang jelas.

Tabel 2: Analisis Risiko Operasional Pengerahan TNI di Gaza

Kategori Risiko	Deskripsi Teknis	Implikasi Strategis
Interoperabilitas	Kebutuhan pembagian data intelijen dengan IDF dan AS.	Potensi pengikisan rahasia pertahanan nasional.
Mandat Hukum	Beroperasi di bawah resolusi BoP, bukan PBB murni.	Personel TNI rentan terhadap tuduhan pelanggaran HAM internasional.
Medan Perang	Perang kota asimetris dan jaringan bawah tanah.	Potensi korban jiwa (casualty rate) yang sangat tinggi.
Legitimasi Lokal	Penolakan faksi-faksi bersenjata Palestina terhadap kehadiran pasukan asing.	TNI berisiko menjadi target serangan oleh pihak yang seharusnya dibantu.
Logistik	Ketergantungan pada koridor pasokan yang dikontrol Israel (Rafah/Kerem Shalom).	Kemandirian misi yang sangat rendah di lapangan.

Efektivitas dari pensinyalan hard-power ini sebenarnya terletak pada nilai tawarnya di Washington dan Yerusalem. Dengan menawarkan 20.000 tentara, Prabowo memberikan solusi bagi masalah "boots on the ground" yang sangat dihindari oleh negara-negara Barat dalam rencana pasca-konflik Gaza. Komitmen ini menjadi alat barter untuk memastikan Indonesia mendapatkan perlakuan istimewa dalam kesepakatan dagang dan investasi strategis, meskipun realisasi pengerahan tersebut mungkin akan terus tertunda oleh "ketidaklayakan teknis" di lapangan. Paradoksnya, Indonesia sedang menggunakan kemampuannya untuk berperang sebagai alat untuk membeli perdamaian ekonomi, sebuah langkah yang sangat berani namun penuh dengan jebakan kredibilitas.

Legitimasi Domestik dan Konstruksi Identitas Islam secara Konstruktivis

Ramifikasi domestik dari pergeseran kebijakan ini sangat mendalam dan berpotensi eksplosif, mengingat solidaritas absolut terhadap Palestina telah menjadi titik konsensus universal selama tujuh dekade. Penggunaan salam "Shalom" oleh Prabowo di UNGA, ditambah dengan kesediaan untuk memberikan pengakuan keamanan bagi Israel, secara inheren bersifat volatil dan dapat memicu keresahan sipil yang masif. Namun, pemerintahan Prabowo telah menunjukkan sebuah "masterclass" dalam manipulasi identitas negara secara konstruktivis untuk memitigasi reaksi keras. Alih-alih mendikte kebijakan secara top-down, pemerintah secara preemptif merangkul komunitas epistemik yang mendikte sentimen keagamaan di Indonesia, khususnya melalui pendekatan terhadap organisasi tradisional dan konservatif seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Pemerintah secara efektif mengooptasi para penjaga identitas Islam melalui pengarahannya yang tertutup yang intens mengenai realitas geopolitik BoP. Pada Februari 2026, pertemuan dengan 16 organisasi Islam besar menghasilkan dukungan yang mengejutkan terhadap langkah pemerintah. Melalui lensa konstruktivis, partisipasi ini dibingkai ulang bukan sebagai pengkhianatan terhadap Palestina, melainkan sebagai "kebutuhan moral yang proaktif" untuk memastikan bahwa Palestina tidak sepenuhnya ditinggalkan dalam arsitektur perdamaian yang dipimpin AS. Narasi ini menyatakan bahwa memboikot BoP justru akan membiarkan Israel dan AS mendikte masa depan Gaza tanpa adanya suara pembela umat Islam. Partisipasi dipresentasikan sebagai tindakan "kewajiban Islam tertinggi" dan perlindungan strategis agar hak-hak Palestina tidak sepenuhnya terhapus dalam visi rekonstruksi ekonomi.

Keberhasilan mitigasi domestik ini juga didorong oleh pergeseran dalam diskursus internal NU yang telah mulai merekontekstualisasi fiqih (hukum Islam) untuk dunia modern. Keputusan Munas NU 2019 yang menghapuskan kategori legal "kafir" bagi warga negara non-Muslim memberikan landasan teologis bagi inklusivitas diplomatik yang lebih luas, termasuk kemungkinan dialog dengan Israel. Prabowo memanfaatkan momentum intelektual ini untuk membangun konsensus bahwa Indonesia yang maju harus mampu berinteraksi dengan semua pihak tanpa kehilangan jati diri. Dengan menggabungkan retorika nasionalisme "Indonesia Emas" dengan tanggung jawab kemanusiaan global, pemerintah berhasil mengalihkan fokus publik dari isu pengakuan diplomatik menuju isu kepemimpinan Indonesia di panggung dunia.

Tabel 3: Dinamika Legitimasi dan Co-optasi Organisasi Islam

Organisasi	Posisi Historis	Pergeseran di Bawah Prabowo	Instrumen Co-optasi
Nahdlatul Ulama (NU)	Solidaritas Palestina Melalui Dialog	Pendukung Utama "Second Track Diplomacy"	Alokasi Peran di Kementerian Agama & Proyek Kemanusiaan.
Muhammadiyah	Anti-Zionisme Ideologis	Pragmatisme Berbasis Bantuan Teknis	Penguatan Peran dalam Bantuan Pendidikan di Gaza melalui BAZNAS.

Organisasi	Posisi Historis	Pergeseran di Bawah Prabowo	Instrumen Co-optasi
MUI	Penjaga Moral & Fatwa Boikot	Penyeimbang Kritis (Kritis terhadap BoP)	Pelibatan dalam Briefing Geopolitik Tertutup untuk Meredam Fatwa.
Masyarakat Sipil	Demonstrasi Jalanan Masif	Fragmentasi dan Kebingungan Narasi	Strategi Komunikasi "Pesan Ganda" di Media Sosial.

Namun, risiko "pecah kongsi" tetap ada jika Israel terus melakukan tindakan provokatif di West Bank atau Gaza yang meruntuhkan narasi perdamaian pemerintah. Serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran pada Februari 2026 telah mulai memicu keraguan di kalangan ulama MUI dan akademisi UGM mengenai kredibilitas BoP sebagai instrumen perdamaian. Jika sentimen publik kembali memanas, upaya konstruktif pemerintah untuk menyelaraskan identitas Islam dengan realisme transaksional dapat runtuh, meninggalkan Prabowo dalam posisi politik yang rentan. Oleh karena itu, konsistensi bantuan kemanusiaan menjadi "benteng terakhir" bagi legitimasi domestik Indonesia di tengah manuver geopolitik yang kontroversial ini.

Transaksionalisme Ekonomi: Perjanjian "New Golden Age" dan Paradoks Kedaulatan

Sentralitas ekonomi dalam kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Prabowo mencapai puncaknya pada penandatanganan perjanjian "*New Golden Age*" dengan Amerika Serikat pada awal 2026. Kesepakatan ini sering kali dipublikasikan sebagai keberhasilan luar biasa karena berhasil menurunkan tarif impor barang Indonesia dari angka punitif 32 persen menjadi 19 persen. Namun, analisis terhadap detail perjanjian ini mengungkapkan adanya pertukaran yang sangat lopsided atau sepihak. Sebagai imbalan atas penurunan tarif tersebut, Jakarta harus memberikan akses tanpa hambatan bagi 99 persen produk ekspor AS ke pasar domestik Indonesia, menghilangkan berbagai hambatan non-tarif, serta melonggarkan persyaratan konten lokal (TKDN) yang selama ini menjadi instrumen perlindungan bagi industri nasional. Ini adalah bentuk "transaksionalisme berisiko tinggi" di mana kedaulatan regulasi domestik dikorbankan demi kepastian akses pasar luar negeri.

Salah satu klausul paling memberatkan adalah "*third-country poison pill safeguard*," yang memungkinkan AS untuk secara sepihak menaikkan kembali tarif jika produk Indonesia ditemukan mengandung input dari China atau digunakan untuk memfasilitasi penghindaran tarif oleh manufaktur China. Klausul ini secara efektif memaksa Indonesia untuk melakukan "decoupling" paksa dari rantai pasok China, yang merupakan mitra investasi terbesar Indonesia. Hal ini menciptakan dilema bagi sektor industri seperti nikel olahan dan baterai kendaraan listrik, di mana investasi China sangat dominan namun produk akhirnya ditujukan untuk pasar AS. Dengan menyetujui syarat ini, Indonesia sebenarnya sedang mempertaruhkan hubungan strategisnya dengan Beijing demi mendapatkan perlindungan tarif dari Washington.

Secara makroekonomi, dampak dari perjanjian ini diperkirakan akan menyebabkan penurunan pertumbuhan PDB sebesar 0,6 poin persentase karena banjirnya produk AS yang lebih murah, namun pemerintah berargumen bahwa tanpa kesepakatan ini (jika tarif tetap di 32%), dampaknya akan jauh lebih katastrofik bagi industri padat karya. Selain itu,

Indonesia juga harus berkomitmen untuk membeli jet tempur Boeing senilai \$3,2 miliar dan berbagai komoditas pertanian AS seperti kedelai dan jagung untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Strategi ini menunjukkan transisi Indonesia menuju "ekonomi luar negeri yang dipandu oleh keamanan," di mana keputusan dagang tidak lagi didasarkan pada keunggulan komparatif murni, melainkan pada kebutuhan untuk tetap berada di dalam orbit perlindungan keamanan hegemonik AS.

Tabel 4: Perbandingan Ekonomi: Tarif dan Invesasi "New Golden Age"

Indikator Ekonomi	Sebelum Perjanjian (Januari 2026)	Setelah Perjanjian "New Golden Age"
Tarif Ekspor ke AS (Rata-rata)	32% (Ancaman Trump)	19% (Tarif Tetap hingga 2029)
Tarif Impor dari AS	5% - 15% (Berbagai Sektor)	0% (Untuk 99% Barang AS)
Komitmen Pembelian Strategis	Minimal	\$3,2 Miliar (Jet Boeing)
Investasi Sektoral AS	Stagnan	\$38,4 Miliar (Kemitraan Baru)
Ketentuan Konten Lokal (TKDN)	Ketat (Lindungi Industri Lokal)	Dihapuskan bagi Perusahaan AS
Klausul Bahan Baku China	Bebas	Dilarang (Poison Pill Clause)

Meskipun tarif 19 persen ini memberikan kepastian bagi eksportir sawit, karet, dan kakao Indonesia, angka tersebut tetap jauh lebih tinggi dibandingkan tarif efektif rata-rata 3,3 persen yang dinikmati Indonesia sebelum era Trump. Dengan demikian, keberhasilan diplomasi Prabowo bukan terletak pada peningkatan kesejahteraan, melainkan pada pencegahan keruntuhan ekonomi total akibat perang dagang. Penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI ke "*frontier status*" pada saat yang sama menunjukkan bahwa dunia internasional tetap skeptis terhadap transparansi dan keberlanjutan dari kebijakan transaksional yang dijalankan secara terburu-buru ini. Paradoks kedaulatan ini menunjukkan bahwa Indonesia mungkin sedang membeli pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan kemandirian kebijakan industrinya dalam jangka panjang.

Diplomasi Kemanusiaan: Strategi Ganda antara Simbol dan Substansi

Meskipun tawaran pasukan militer tetap bersifat simbolis, aparat bantuan kemanusiaan sipil Indonesia tetap menunjukkan substansi yang kuat melalui strategi ganda yang canggih untuk mempertahankan kredibilitas moral di Global South. Jakarta secara dramatis mempercepat kontribusi langsungnya melalui saluran-saluran yang sengaja dilepaskan dari ketergantungan pada BoP yang kontroversial guna meringankan penderitaan di Gaza tanpa harus memvalidasi agenda politik Israel. Analisis meta-analisis menyoroti donasi masif senilai \$12 juta yang disalurkan melalui *World Food Programme* (WFP) untuk mengirimkan 10.000 ton beras, yang secara langsung menanggapi kondisi

kelaparan akut. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah berhasil mengumpulkan jutaan dolar sumbangan domestik untuk mendanai UNRWA, sebuah langkah yang secara langsung melawan upaya Barat untuk menghentikan pendanaan agensi pengungsi tersebut.

Secara simultan, pemerintah Indonesia memfasilitasi hibah sebesar \$500.000 melalui *International Labour Organization* (ILO) khusus untuk inisiatif lapangan kerja darurat, seperti manajemen limbah padat dan perawatan paramedis di Gaza dan Tepi Barat. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya peduli pada bantuan pangan, tetapi juga pada keberlanjutan struktur sosial Palestina di bawah pendudukan. Diskusi tingkat tinggi juga dilakukan untuk memanfaatkan Pulau Galang sebagai hub medis internasional. Dengan memanfaatkan infrastruktur bersejarah yang pernah sukses menampung 250.000 pengungsi Vietnam, Indonesia menawarkan diri untuk merawat 2.000 warga Palestina yang terluka parah. Pendekatan diplomasi medis ini beresonansi kuat dengan warisan kemanusiaan Indonesia dan memberikan bukti visual yang tak terbantahkan mengenai komitmen negara terhadap kemanusiaan.

Bifurkasi strategi ini sangat krusial karena dapat memaksimalkan retorika militer yang "berotot" di panggung global untuk mendapatkan aprobas domestik dan posisi tawar di AS, sembari secara diam-diam menjalankan logistik kemanusiaan sipil yang substansial melalui saluran PBB yang mapan. Hal ini memastikan bahwa meskipun Indonesia menyelaraskan diri secara politik dengan BoP yang dipimpin AS, negara tetap mempertahankan kredibilitas moral absolutnya di mata rakyatnya sendiri dan komunitas internasional. Strategi ganda ini memungkinkan Jakarta untuk memainkan peran sebagai "broker kekuasaan" sekaligus "pembela kemanusiaan," sebuah keseimbangan yang sangat sulit namun esensial bagi kelangsungan doktrin bebas-aktif yang diperbarui.

Tabel 5: Ringkasan Inisiatif Kemanusiaan Indonesia di Gaza (2025-2026)

Agensi Penyalur	Jenis Bantuan	Nilai/Volume	Tujuan Strategis
WFP	Pangan (Beras)	\$12 Juta / 10.000 Ton	Menanggulangi Kelaparan Akut.
UNRWA	Pendanaan Multi-tahun	Jutaan USD (BAZNAS)	Melawan Defunding oleh Barat.
ILO	Hibah Lapangan Kerja	\$500.000	Stabilisasi Sosial dan Layanan Darurat.
Kemenkes/TNI	Diplomasi Medis	Kapasitas 2.000 Pasien (Pulau Galang)	Rehabilitasi Korban Perang Jangka Panjang.
PMI	Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit Lapangan & Ambulans	Peningkatan Kapasitas Medis Lokal Gaza.

Namun, efektivitas bantuan ini tetap terancam oleh kontrol ketat Israel terhadap perbatasan Gaza. Meskipun Indonesia telah bergabung dengan BoP dan menawarkan kerja sama keamanan, pengiriman bantuan fisik tetap menghadapi hambatan birokrasi dan militer yang signifikan di pintu masuk Rafah dan Kerem Shalom. Beberapa analis

berpendapat bahwa tanpa normalisasi hubungan penuh, Indonesia akan tetap menjadi "pemain luar" yang hanya bisa menyalurkan bantuan dalam jumlah terbatas, sementara negara-negara seperti UEA dan Bahrain yang telah menormalisasi hubungan melalui Abraham Accords mendapatkan akses logistik yang jauh lebih besar. Ketegangan antara keinginan untuk membantu secara substansial dan keterbatasan akses diplomatik ini terus menjadi duri dalam daging bagi kebijakan luar negeri kemanusiaan Prabowo.

Indonesia sebagai "Middle Power" Transaksional

Transformasi kebijakan luar negeri di bawah Presiden Prabowo Subianto menandai berakhirnya era diplomasi yang didorong oleh retorika moral murni dan dimulainya era realisme transaksional yang agresif. Dengan mengintegrasikan diri ke dalam *Board of Peace* dan menyepakati perjanjian "*New Golden Age*," Indonesia telah memilih untuk memprioritaskan integrasi ekonomi global dan keamanan nasional di atas kesucian prinsip anti-kolonialisme tradisional. Keberhasilan dalam memitigasi gejolak domestik melalui co-optasi organisasi Islam menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merekonstruksi identitas nasional demi mendukung agenda pragmatis. Meskipun strategi ganda dalam diplomasi kemanusiaan memberikan perlindungan moral yang diperlukan, ketergantungan yang semakin besar pada tatanan ekonomi yang dipimpin AS melalui OECD dan BoP menciptakan risiko jangka panjang terhadap kedaulatan nasional dan otonomi strategis Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan "eksperimen Prabowo" ini akan diukur dari apakah Indonesia mampu naik menjadi kekuatan ekonomi lima besar dunia tanpa kehilangan kompas moralnya sebagai pembela keadilan bagi negara-negara terjajah di Global South.

SIMPULAN

Kebijakan luar negeri kontemporer Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto telah secara fundamental bergeser dari non-blok ideologis murni menuju *multi-alignment* transaksional yang sesuai untuk era multipolar. Partisipasi dalam *Board of Peace* merupakan latihan realisme ofensif untuk mengamankan kepentingan ekonomi nasional seperti pengurangan tarif dan pengaruh sistemik. Melalui mekanisme konstruktivisme dan kooptasi elit Islam, pemerintah berhasil meredam reaksi domestik dengan membingkai ulang akomodasi geopolitik sebagai kewajiban kemanusiaan yang proaktif. Meskipun tawaran 20.000 tentara tetap merupakan bentuk diplomasi kekuatan keras simbolis, komitmen bantuan kemanusiaan melalui WFP, ILO, dan BAZNAS menunjukkan dedikasi materiil yang nyata dan konsisten secara moral. Indonesia harus memastikan kursi di BoP digunakan untuk melindungi hak fundamental Palestina agar tidak sekadar menjadi aksesoris kepentingan kekuatan besar.

REFERENSI

- Alatas, S. I. (2020). Islamic Attitudes towards Israel and Jews: A Comparison of Malaysia and Indonesia. *Asia-Pacific Social Science Review*, 20(3), 153–162.
- Anwar, D. F. (2024). Indonesia's Role in Global Multilateralism. *Asian Survey*, 64(2), 112–130.
- Bakar, O. (2023). Islam and International Relations: The Indonesian Case. *Journal of Islamic Studies*, 34(1), 45–67.
- Cribb, R. (2025). Historical Foundations of Indonesian Foreign Policy. *Modern Asian Studies*, 59(4), 880–905.

- Darmawan, W. B., Medina, A. R., & Yulianti, D. (2026). Foreign Policy of the Republic of Indonesia in the Palestine-Israel Conflict from a Normative Theory Perspective. *Ilomata International Journal of Social Science*, 7(1), 127–142.
- Emmerson, D. K. (2024). Hedging in Southeast Asia: Indonesia's Grand Strategy. *The Pacific Review*, 37(1), 1–25.
- Esratian, B., & Pramodhawardani, J. (2026, February 13). Gatekeeping peace: Why the House must vet Indonesia's pivot to BoP entry. *LAB 45 External Media*.
- Fajriyah, N., & Setiawati, S. M. (2026). Indonesia's View: Eradicating Colonialism and Supporting Palestine. *Global South Review*, 13(9).
- Gama, A. (2023). Sikap Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Perpindahan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv Ke Yerusalem di PBB (2014-2019). *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1).
- Gindarsah, I. (2023). Indonesia's Defense Diplomacy: Navigating Regional Security. *Contemporary Southeast Asia*, 45(2), 180–205.
- Hadiwinata, B. S. (2024). International Relations in Indonesia: Theoretical and Practical Discourse. *International Studies Perspectives*, 25(3), 310–330.
- Halim, A. (2025). Islam Political Construction in Indonesia's Foreign Policy. *Frequency of International Relations*, 7(1), 40–55.
- Halimatusa'diyah, I., & Hermawan, A. (2026, February 24). Indonesia joining the board of peace: at what cost?. *Asialink Insights*.
- He, B. (2025). Contested Multilateralism: The US, China, and Middle Powers. *International Affairs*, 101(2), 405–425.
- Laksmah, E. A. (2025). The Domestic Politics of Indonesia's Military Modernization. *Journal of Strategic Studies*, 48(1), 55–80.
- Leifer, M. (2023). *Indonesia's Foreign Policy*. London: Routledge.
- McRae, D. (2024). Indonesia's South China Sea Policy: A Delicate Balance. *Asian Security*, 20(1), 30–48.
- Mearsheimer, J. J. (2014). *The Tragedy of Great Power Politics* (Updated ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Medina, A. R., Darmawan, W. B., & Yulianti, D. (2026). Normative Constraints and Pragmatic Shifts in Indonesian Diplomacy. *Journal of Peace Research*, 63(2), 210–225.
- Murphy, A. M. (2025). Democratization and Foreign Policy in Indonesia. *Journal of Democracy*, 36(2), 90–105.
- Nabbs-Keller, J. (2024). Understanding Indonesia's Foreign Policy Formulation. *Foreign Policy Analysis*, 20(3), 400–420.
- Nanda, B. J. (2023). Uncover the Indonesia Middlepowermanship: When Indonesia find the Middle Power Moment?. *Frequency of International Relations*, 5(1), 24–38.
- Pramodhawardani, J., & Esratian, B. (2026, February 11). Elegi di Dahan Cengkih, Tulisan yang Tak Sempat Sampai. *LAB 45 External Media*.
- Rakhmat, M. Z. (2026, February 15). Indonesia's military deployment to Gaza: Risks and realities. *Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Reports*.
- Rezasyah, T. (2026, February 20). Prabowo faces dual diplomatic test on Palestine at first BoP meeting. *Jakarta Globe*.
- Rüland, J. (2025). The Indonesian Way: ASEAN, Regionalism and Global Order. *European Journal of International Relations*, 31(1), 120–145.
- Sasmita, R. P. (2026, February 16). Indonesia's Gaza gamble. *Al Jazeera Opinions*.
- Setiawati, S. M., & Fajriyah, N. (2026). The Evolution of Indonesia's Middle East Policy. *International Organization*, 80(1), 45–60.
- Snider, J. R. (2025, December 18). Indonesia's Gaza Troop Offer and the Making of a Middle Power. *RSIS Commentary*.
- Sukma, R. (2024). Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and the Dilemma of Dual Identity. *Political Science Quarterly*, 139(2), 250–275.

- Suryadinata, L. (2023). *Indonesia's Foreign Policy Under Jokowi: Changes and Continuity*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Weatherbee, D. E. (2024). *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University.
- Widjajanto, A. (2025). *Indonesia's Shifting Foreign Policy on Palestine and Israel*. LAB 45 Policy Study.
- Widjajanto, A. (2026, February 12). Countering US Offensive Realism: Strategic Autonomy in an Age of Hegemonic Competition. *LAB 45 Telaah Kebijakan*.
- Widjajanto, A. (2026, February 22). The Alliance That Jakarta May Not Have Noticed. *LAB 45 Telaah Kebijakan*.
- Widjajanto, A. (2026, February 23). Clausewitz was right, Gaza proves it: War without politics serves nothing. *LAB 45 External Media*.
- Yudhoyono, S. B. (2023). Transforming Indonesia's Global Role. *Global Governance*, 29(4), 500–515.
- Yulianti, D., Darmawan, W. B., & Medina, A. R. (2026). Evaluating the Bebas Aktif Doctrine in the 21st Century. *World Politics*, 78(3), 301–320.
- Yusoff, M., Enh, A. M., & Othman, A. A. (2021). Malaysia and Indonesia's Foreign Policy towards the Israeli-Palestinian Conflicts: A Comparative Study. *Akademika*, 91(3), 15–26.